

HUMANISASI PENDIDIKAN; MENEGUHKAN SISI KEMANUSIAAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN

Sholehuddin, M.Pd

Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta

DOI 10.5281/zenodo.1303859

ABSTRAK

Humanisasi pendidikan adalah proses pendidikan yang ditujukan untuk pengembangan potensi-potensi peserta didik sebagai manusia seutuhnya, yang dilakukan secara manusiawi (memanusiakan manusia), sehingga peserta didik dapat berkembang baik menuju kearah kesempurnaan. Pandangan manusia dan proses humanisasi, banyak diuraikan dan diyakini selalu menjadi perhatian para pemikir dalam pelbagai bidang ilmu. Namun, meskipun ada banyak pendapat tentang humanisme, yang paling jelas, baik secara sadar ataupun tidak sadar, eksplisit maupun implisit, terarah pada keinginan yang besar untuk mengkultuskan manusia. Humanisasi pendidikan merupakan upaya untuk menyiapkan generasi yang cerdas nalar, cerdas emosional, dan cerdas spiritual, bukan menciptakan manusia yang kerdil, pasif, dan tidak mampu mengatasi persoalan yang dihadapi. Pendidikan meniscayakan untuk lebih membentuk manusia lebih manusiawi, dan tentunya dengan mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan, karena peserta didik adalah manusia yang harus dimanusiakan.

Kata Kunci: *Humanisasi Pendidikan*

Humanization of education is the educational process aimed at the development of the potential learners as a whole human, which is done humanely (humanize manusia), so that learners can grow well towards the direction of perfection. Human views and the process of humanization, many described and believed to always be the attention of thinkers in various fields of science. Yet, although there are many opinions about humanism, most obviously, consciously or unconsciously, explicitly or implicitly, is directed at a great desire to cult people. Humanization of education is an attempt to prepare a generation of intelligent reasoning, intelligent emotional, and spiritual intelligent, rather than creating people who are stunted, passive, and unable to overcome the problems faced. Education necessitates to

make human beings more human, and of course by putting forward the aspects of humanity, because students are human beings who must be humanized .

PENDAHULUAN

Diskursus hak asasi manusia (HAM) dengan pendidikan tidak bisa dilepaskan, karena di samping pendidikan merupakan hak dasar manusia, pendidikan juga dilakukan manusia sebagai upaya mempertahankan eksistensinya. Selama eksistensi manusia masih terjaga, maka persoalan HAM tidak akan berhenti mengemuka. Jadi membicarakan tentang HAM, rasanya tidak pernah puas karena hal ini menyangkut tentang martabat kemanusiaannya. Manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan bentuk yang sebaik-baiknya.

Demikianlah, HAM ketika tercabut dari manusia, maka dia tidak dapat dikatakan manusia lagi. Disamping itu, melalui HAM-lah manusia dapat mengakui dirinya sebagai manusiawi. Atau dengan kata lain, dengan adanya HAM (Hak Asasi Manusia) setidaknya suatu keadaan dapat diukur kadar kemanusiawannya. Menurut UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa Hak Asasi Manusia adalah seprearangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sedangkan PBB menyatakan, bahwa adalah *human rights could be generally defined us those rights which are inherent in or nature and without which we cannot live as human beings.*¹ HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpa hak tersebut manusia mustahil hidup sebagai manusia. Sementara itu menurut Tap MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, sebagaimana dikutip oleh H.A.R. Tilaar, bahwa HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas dan diganggu gugat oleh siapapun.² Hal ini karena keberadaan HAM pada diri manusia bersifat *inalleable* dari hakekat manusia. Dengan demikian pengakuan terhadap “perikemanusiaan” merupakan intisari dari rumusan HAM. Definisi HAM yang berbeda-beda tetapi semua orang sepakat bahwa HAM adalah hak dasariah yang dimiliki oleh setiap manusia, semata-mata karena ia manusia.³

PEMBAHASAN

1. Hakekat Manusia dan Pendidikan

Secara hakiki, pendidikan adalah strategi manusia untuk mempertahankan sifat kemanusiaannya. Manusia tidak bisa dilepaskan dari proses pendidikan.

Justru eksistensi manusia terletak pada eksistensi pendidikannya. Dengan pendidikan yang baik dan unggul, maka akan menghasilkan pribadi – pribadi yang unggul, begitupun sebaliknya.

Sejarah mencatat bahwa seseorang tumbuh dan berkembang tidak dengan sendirinya. Ia membutuhkan proses, dan proses itu adalah pendidikan. Sejak masih bayi, seseorang sudah dididik melalui kasih sayang ibunya, bahkan sejak dalam kandungan pun, seorang ibu telah menjaga dirinya dengan harapan akan berdampak positif bagi jabang bayi yang dikandungnya. Pendidikan datang dari manusia, dilakukan oleh manusia dan ditujukan untuk menjaga dan mempertahankan eksistensi kemanusiaannya. Ketika eksistensi kemanusiaannya hilang, maka sesungguhnya ia bukanlah manusia, karena sifat-sifatnya sebagai manusia tidak mencerminkan kemanusiaannya.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, namun ketika ia sudah mengabaikan kemanusiaannya, maka derajatnya tidak lebih tinggi dan seekor binatang. Hal ini telah diterangkan dalam Al-Qur'an surat At-Tien ayat 4-5. "Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka). Hakekat manusia dapat dilihat dari berbagai dimensi. Dimensi religius terlihat, bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, dimensi sosiologis ia adalah makhluk sosial yang berada pada suatu komunitas atau masyarakat. Selanjutnya ia dapat dilihat dan dimensi simbolis, yakni makhluk yang mengenal dan memiliki nilai-nilai estetika, etika, ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya, sedangkan dari dimensi individualnya ia merupakan sosok yang memiliki berbagai macam keunikan dan kekhasan tersendiri. Hal ini akan sangat berbeda dengan yang dimiliki manusia lainnya. Manusia juga dapat dilihat dari dimensi historis, hanya manusia yang dapat dikatakan makhluk yang menyejarah. Oleh karena itu manusia akan terus-menerus berkembang selama keberadaannya di dunia ini.⁴ Manusia adalah makhluk monodualis, artinya manusia yang nampaknya satu tapi sebenarnya terdiri dari dua unsur yaitu jiwa dan raga, jasmani dan rohani. Disebut makhluk monodualis karena kedua unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia akan tetap disebut manusia jika kedua unsur tersebut masih melekat padanya. Kedua unsur tersebut akan selalu berkembang menuju kesempurnaan.

Karena itu, manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat berkembang baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam kedua unsur tersebut, terdapat potensi-potensi yang dapat dikembangkan, dan hal itu, merupakan strategi manusia untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaannya di dunia ini. Ia juga memiliki budaya yang akan terus berkembang mengisi ruang-ruang kehidupannya. Dengan begitu, manusia dapat disebut sebagai makhluk berbudaya dan berkembang seiring penemuan berbagai inovasi-inovasi untuk kelanjutan hidupnya yang lebih

baik. Dengan demikian, terdapat suatu gambaran tentang hakekat manusia dan aspek-aspek kemanusiaannya.

Dalam kapasitasnya sebagai *homo edukandum* (mahluk yang harus dididik), atau ia bisa disebut *animal educabil* (mahluk sebangsa binatang yang bisa dididik),⁵ manusia memiliki potensi besar dalam pendidikan, ia adalah mahluk yang bisa mendidik dan bisa dididik. Potensinya dalam pendidikan menjadikan dirinya terus exist dan berkembang. Dengan pendidikan, manusia dapat mempertahankan dirinya dari segala ancaman yang menghantui eksistensinya. Namun, yang menjadi masalah ialah pendidikan seperti apa yang mampu mempertahankan eksistensi manusia?

John Dewey berpendapat, bahwa pendidikan sebagai salah satu kebutuhan hidup manusia (*education as necessity of life*), sebagai fungsi sosial (*education as sosial function*), sebagai pedoman atau bimbingan (*education as direction*), sebagai sarana pertumbuhan (*education as growth*) yang mempersiapkan dan membentuk peserta didik menjadi sempurna, sehingga pada akhirnya akan memperbaiki kehidupannya di masa depan, dan proses ini hanya dapat dicapai lewat transmisi (*renewal of life by transmision*). (John Dewey, 1964)

Sejalan dengan hal itu, Philip H. Phenix mengemukakan bahwa *education is a means of helping human beingsto become what they can and should become, the educator needs to understand human nature. He needs to understand people in their actualities, in their possibilities, and in their idealities. He must also know how foster desirable changes in them.*⁶

Dari sini, terlihat begitu eratnya hubungan antara manusia dengan pendidikan. Manusia tanpa pendidikan akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia, dan pendidikan tanpa manusia tidak akan berjalan, karena hanya manusialah mahluk yang dapat dididik dan mendidik. Oleh karena itu pendidikan harus mengerti manusia dengan segala sisi-sisi kemanusiaannya. Karena itu, pendidikan harus mampu memanusiakan manusia, karena hakekat pendidikan adalah memanusiakan manusia (strategi humanisasi).

2. HAM dan Pendidikan

Ketika manusia meyakini pendidikan sebagai strategi untuk mempertahankan eksistensinya “strategi humanisasi,” tanpa disadari bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang paling substansial pada kehidupan peserta didik, dan hal itu terjadi pada proses pendidikan. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dianugerahkan Allah kepada manusia semata-mata karena ia manusia. Hak ini sangat mendasar dan bersifat inalienable dan universal. Oleh karena itu, keterbatasan ruang dan waktu tidak dapat dijadikan *justifier* atas pelanggaran HAM. Seluruh hak asasi manusia baik dalam bidang politik, hukum, sosial, maupun ekonomi pada hakekatnya mengacu pada tujuan untuk melindungi harkat

dan martabat sendiri, sehingga setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan kepribadiannya.⁷

Proses pendidikan seperti yang banyak terjadi di negeri ini tanpa disadari telah mengabaikan HAM peserta didik. Sentralisasi merupakan pucuk dan praktek ini, karena dari sinilah diberlakukannya *rigid sistem*. Sistem yang tidak memberikan ruang pada kaum pendidik dan pengelola pendidikan serta kepada peserta didik untuk berekspresi secara bebas. Padahal kebebasan berekspresi adalah bagian dari HAM mereka.

Kaum pendidik merasa tertekan, karena aksesnya terhadap pelajaran telah tertutup oleh sebuah “paket” yang di “drop” dari pusat. Kondisi ini menyebabkan kaum pendidik terpaksa “setia” kepada penguasa. Disadari atau tidak, bahwa kreatifitas guru untuk berkreasi dan bereksperimen telah mati karena dimatikan oleh sistem ini. Dan sinilah “krisis inovasi” dalam pendidikan itu muncul, karena guru sebagai garda terdepan (*avant-garde*) dalam pendidikan telah menjadi “robot-robot besar” yang kendalinya dipegang penguasa. Kebebasan adalah hal yang paling substansi dalam HAM, dan itu telah dilanggar. Apakah ini bukan pelanggaran HAM?

Kondisi lebih parah terjadi pada peserta didik, mereka menjadi korban dari sistem ini. Ketika sang pendidik tidak memiliki akses untuk mengembangkan pelajaran sesuai dengan kualitas dan kuantitas ilmu yang dimilikinya, maka kreatifitas peserta didik telah terpasung. Peserta didik sering dijadikan objek pasif, dan guru menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga pendidikan tidak mampu membebaskan peserta didik karena pendidikpun tidak dibebaskan. Bagaimana mau membebaskan orang lain sementara dirinya sendiri tidak terbebaskan. Peserta didik hanya menerima dari para pendidik, laksana botol kosong yang setiap hari diisi, tanpa diberi kesempatan untuk mengekspresikan potensi-potensi yang dimilikinya sehingga yang terjadi adalah proses indoktrinasi (*indoctrination*).

Realitas lain yang sering terjadi adalah sikap “otoriter” guru. Guru mendudukan dirinya sebagai “penguasa” dalam kelas. “Mentang-mentang” ia memiliki wewenang mutlak memberikan nilai pada siswa yang dikehendaknya, lantas ia dengan seenaknya memperlakukan siswa. Peserta didik harus menurut dengan apa yang telah perintahnya. Guru sering mengumbar emosi “marah-marah” dalam kelas, karena guru menganggap bodoh muridnya. Padahal yang bodoh bukan peserta didik, tapi gurunya yang tidak mau mengerti muridnya sendiri, serta penyampaian materi yang mungkin tidak sesuai dengan yang dikehendaki peserta didik. Ini adalah arogansi yang telah membunuh kreatifitas dan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi-materi yang menyangkut realitas kehidupannya.

Guru masih sering menganggap bahwa pendidikan adalah *transfer of knowledge* semata, karena itu orientasinya pada pengejaran “hasil” bukan pada

“proses”. Padahal guru seharusnya melakukan hal-hal yang jauh lebih penting selain meneruskan pengetahuan. Ini mencakup bimbingan moralitas, pengembangan diri, rasa simpati, empati dan mengungkap kualitas-kualitas lainnya yang dibutuhkan peserta didik untuk menjadi seorang yang utuh.⁸ Proses pembelajaran seharusnya dilandasi oleh pengetahuan komprehensif terhadap kondisi kejiwaan dan background kehidupan peserta didik serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kasih sayang, kejujuran, keikhlasan “keridlaan” dan dalam suasana kekeluargaan, bukan kekuasaan. Sehingga baik pendidik, peserta didik maupun pengelola pendidikan tidak ada yang merasa tertekan, semuanya dilakukan dalam kondisi demokratis dan humanis serta menyenangkan.

Menarik dengan apa yang diungkapkan oleh Paulo Freire, bahwa proses pendidikan adalah proses yang membebaskan. Di mana pendidikan mengkondisikan peserta didik untuk mengenal dan mengungkap kehidupan yang senyatanya secara kritis. Dalam pendidikan yang membebaskan, tidak ada subjek yang membebaskan dan objek yang dibebaskan, oleh karena itu proses ini bersifat dialogis.⁹ Tidak ada lagi dikotomi antara guru dan peserta didik, karena kedudukan mereka adalah partner. Proses seperti inilah yang lebih memanusiakan manusia, karena itu pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan pendidikan lebih dapat di cegah.

3. Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari Hak Asasi Manusia, begitu juga Hak Asasi Manusia tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Di samping sebagai Hak Asasi Manusia, pendidikan juga dijadikan sebagai wahana efektif untuk perealisasi Hak Asasi Manusia itu sendiri. Dalam berbagai piagam atau deklarasi HAM, masalah pendidikan selalu termaktub di dalamnya, karena pendidikan adalah bagian dari hak asasi manusia. Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari hak-hak asasinya, keberadaannya selalu melekat pada diri manusia, dimanapun ia berada. Setiap manusia tanpa memandang latar belakang suku, agarna, status sosial dan segala perbedaan yang ada, tidak rnenjadikannya berbeda dalam kepemilikan HAM. Semua manusia adalah sama dan tidak ada seorang pun memiliki HAM yang lebih tinggi di antara yang lain.

Keterkaitan antara HAM dan pendidikan tidak dapat disangkal lagi, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena antara keduanya terdapat hubungan eksistensial, artinya proses pendidikan tidak akan terlepas dan HAM, demikian pula HAM tidak memiliki arti apa-apa tanpa adanya proses pendidikan. Karena pada hakekatnya proses pendidikan adalah proses untuk merealisasikan HAM.¹⁰

Oleh karena itu, HAM memandang bahwa pendidikan adalah wahana perealisasi hak-hak asasi manusia. Jadi, apabila proses pendidikan mengabaikan HAM peserta didik, maka penghargaan terhadap HAM cepat atau lambat akan hilang dan interaksi sosial manusia. Manusia tidak memiliki lagi wahana efektif

untuk mempertahankan eksistensinya, karena pendidikan sebagai perealisasi HAM sudah tidak berfungsi lagi.

HAM selalu melekat pada manusia artinya eksistensi manusia ditentukan oleh pengakuan akan hak asasinya, tanpa pengakuan tersebut seseorang tidak dapat dikatakan menghargai martabat orang (*human dignity*) lain. Menurut Heidegger seperti yang dikutip oleh A. Atmadi dan Y. Setiyaningsih, menyatakan bahwa eksistensi manusia adalah eksistensi bersama-hubungan sosial antar manusia ini mengandaikan hubungan dua subjek yang saling meminta supaya diterima dengan hati yang jujur dan baik.¹¹

Hak manusia terhadap pendidikan sangat mendasar bagi kelangsungan hidup mereka di samping hak-hak lain seperti hak akan pangan, sandang, perlindungan, kesehatan, pekerjaan dan lain-lain.¹² Aktifitas pendidikan tidak dapat dibenarkan jika mengabaikan HAM peserta didik, artinya penghormatan terhadap HAM seseorang harus tetap dilakukan meskipun dalam strata sosial mereka lebih rendah. Begitu pun dengan peserta didik, mereka memiliki hak untuk diperlakukan secara sama dalam proses pendidikan.

Keadaan manusia baik laki-laki, perempuan, kulit putih, kulit hitam, kaum moderat, kaum fundamental maupun yang lainnya tidak merupakan penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan ditujukan pada manusia dan untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu pendidikan agar tidak dapat memisah-misahkan umat manusia, karena kodrat manusia adalah mahluk yang memasyarakat. Dalam hal ini menurut Al-Qabisy: "pendidikan harus diberikan pada semua orang berdasarkan persamaan dan penyediaan kesempatan belajar bagi semua secara sama."¹³ Menurut Hadits Nabi Muhammad SAW, yang Artinya: "*Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, baik pria maupun wanita.*" (HR. Ibnu Majah).¹⁴

Menurut John Dewey, pendidikan ditujukan untuk perkembangan pribadi seseorang, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan suatu masyarakat yang sempurna, yakni masyarakat yang berasaskan kerakyatan dan yang memberikan kemungkinan yang sama bagi warganya. Oleh karena itu pendidikan harus memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berpikir dan melakukan percobaan serta penyelidikan, karena itu menurutnya sekolah wajib meneruskan pengalaman masa lampau kepada umat manusia yang hidup pada masa sekarang. Pengalaman peserta didik harus bertambah luas dan dalam, karena itulah alat utama baginya untuk mengenal dan berbuat.¹⁵

Menurut H. A. R. Tilaar, bahwa hakekat pendidikan adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia atau proses humanisasi berarti melihat manusia secara keseluruhan di dalam eksistensinya. Proses pendidikan sebagai proses humanisasi menunjukkan bahwa pendidikan bukanlah suatu yang tertentu (*given*), tapi merupakan suatu aksi yang berkelanjutan. Proses ini tidak berjalan secara linier atau sebab akibat, tapi membutuhkan suatu perenungan atau refleksi

terhadap aksi yang telah dilakukan. Proses aksi-refleksi-aksi berarti proses pendidikan bukanlah proses indoktrinasi karena proses pendidikan sebagai proses perealisasi HAM tidak dapat terjadi dalam proses indoktrinasi, di mana terjadi hubungan satu arah dan tidak adanya dinamisasi pembelajaran.¹⁶

Proses pendidikan sebagai proses perealisasi HAM berarti bahwa peserta didik harus dipandang sebagai manusia secara utuh, dia sama dengan manusia lainnya yang memiliki beragam pikiran, hak, kreatifitas, dan kecenderungan untuk berbuat. Hal ini mesti disadari oleh pendidik dan pengelola pendidikan. Perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik bukanlah suatu hambatan untuk perealisasi HAM.

Persoalan pendidikan dan HAM tidak dapat dipisahkan, karena pelaku-pelaku pendidikan termasuk peserta didik adalah manusia yang secara otomatis memiliki HAM, Karena itu dengan dalih apapun, tidak dapat dibenarkan jika proses pendidikan mengabaikan HAM. Seperti yang telah diketahui bahwa HAM dimiliki manusia sejak lahir, yang merupakan anugerah Allah SWT. Namun dalam perjalanannya, HAM yang seharusnya dihormati oleh semua orang malah sering dilanggar, bahkan pendidikan yang merupakan wahana efektif perealisasi HAM ternyata tidak jarang menjadi ajang pelanggaran HAM.

Pelanggaran HAM yang dilakukan dalam pendidikan terjadi karena tidak dihormatinya HAM, sehingga seseorang dapat dengan bebas memperlakukan orang lain semaunya. Perlakuan seperti ini sering dilakukan oleh seorang "guru", mereka seakan-akan memiliki legitimasi untuk memperlakukan peserta didik semaunya. Dengan alasan mendidik, mendisiplinkan siswa dan menjaga wibawa guru, mereka berbuat semaunya yang jauh dari fungsinya sebagai orang yang harus digugu dan ditiru. Disadari atau tidak bahwa praktek-praktek seperti itu telah menimbulkan kesenjangan antara guru dan peserta didik.

Selama pendidikan baik formal maupun non-formal dilaksanakan dengan mengabaikan HAM maka tugas pendidikan secara sosiologis, yaitu memelihara kehidupan dan mendorong kemajuan masyarakat akan sangat sulit terwujud.¹⁷ Hal ini karena aktifitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari aktifitas masyarakat, bahkan pendidikan sendiri merupakan aktifitas masyarakat. Dari pendidikan ini, manusia sebagai anggota masyarakat memperoleh pengetahuan cara berinteraksi dengan masyarakat, mengernbangkan dirinya, kepribadian dan lain-lain. Pengetahuan (hasil dari pendidikan) adalah salah satu perlengkapan dasar dalam menempuh kehidupan ini, ternyata kepribadian manusia itu sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pengetahuan yang diperolehnya.¹⁸ Dalam hal ini ternyata pendidikan merupakan sarana pembinaan kepribadian.¹⁹

Menurut Brubacher yang dikutip Chandra Muzaffar, yaitu, "*education, if not power is at least potential power, it equips the disinherited with the means of an ever more efficient protection of their own interest.*" Pendidikan jika bukan kekuasaan, maka paling tidak adalah potensi kekuasaan, pendidikan akan memberi

manusia apa yang ia tidak miliki sebelumnya, pendidikan akan memberi alat proteksi yang selalu efektif bagi minat mereka.²⁰

Dalam kaitan dengan HAM, pendidikan diharapkan mampu menempatkan martabat manusia pada level yang setinggi-tingginya. Akan tetapi dalam kenyataannya, lembaga sekolah yang diakui sebagai wahana efektif untuk melaksanakan program-program pendidikan ternyata tidak mampu mengemban misi kemanusiaan itu. Padahal pendidikan adalah investasi kemanusiaan. Sekolah yang menjalankan aktifitas pendidikan formal ternyata telah menjadi kegiatan yang begitu rumit, kaku dan terlalu diatur sehingga proses belajar dianggap sebagai sesuatu yang aktifitas yang sulit dan otak lebih suka tidak melakukannya. Guru cenderung berpikir bahwa belajar adalah suatu peristiwa yang khusus, yang membutuhkan insentif dan imbalan istimewa. Belajar bukan sesuatu yang dapat dilakukan secara damai dan akan menjadi pilihan semua orang untuk dilakukan. Otak tidak bisa dituding sebagai penyebab keengganan untuk belajar. Belajar adalah fungsi utama otak, pusat perhatiannya yang tidak pernah bergeser dan menjadi gelisah serta frustrasi jika tidak ada pembelajaran yang harus dilakukan. Semua orang mempunyai kemampuan belajar yang besar dan tidak terduga tanpa bersusah payah.²¹

Seharusnya sekolah mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat diterima oleh peserta didik. Tentunya pemahaman tentang peserta didik (aspek kognitif, afektif, HAM, status sosial, latar belakang ekonomi dan lain-lain) dapat menjadi landasan pacu pendidikan. Sehingga pendidikan mampu menjadi proses yang membebaskan dan memanusiakan.

Kenyataan sekolah yang tidak mampu melaksanakan proses yang membebaskan dan memanusiakan disebut oleh Paulo Freire seperti yang dikutip oleh H. D. Sudjana, sebagai ketidakberhasilan sekolah. Sekolah tidak mampu mengembangkan situasi belajar-mengajar yang memberi kesempatan dan kemampuan kepada para peserta didik untuk berpikir kritis, sehingga peserta didik tidak mampu mengenali, menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapinya di dunia ini. Sekolah lebih menekankan hubungan vertikal antara guru dan peserta didik. Dominasi kegiatan di sekolah dipegang oleh para guru yang cenderung bertindak sebagai penekan (*oppressor*) sedangkan peserta didik cenderung berperan sebagai yang tertekan (*oppressed*). Hal ini terjadi, karena tidak dikembangkannya budaya dialog di sekolah dan dilaksanakan dalam situasi “kekuasaan” bukan “kekeluargaan.” Dalam hal ini guru dapat berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik untuk berpikir, bertindak dan mengembangkan potensinya.

Melihat kecenderungan di atas, Freire menganggap bahwa proses seperti itu akan berdampak negatif pada kehidupan masyarakat, oleh karena itu, sebagai usaha mencegah dampak negatif tersebut, ia memusatkan perhatiannya pada pengembangan model-model teoritis sebagai ganti dari proses belajar-mengajar

dalam pendidikan di sekolah, Ia menyodorkan konsep penyadaran (*conscientizacao*) atau pendidikan penyadaran (*consciousness education*). Aplikasi konsep ini pada gerakan “pembebasan” yaitu masyarakat sebagai peserta didik adalah subjek aktif dan potensial dalam pendidikan sehingga tidak ada lagi dikotomi antara yang berkuasa dan yang tidak berkuasa. Pendidikan yang tidak mampu memberikan penyadaran pada masyarakat adalah tidak manusiawi dan tidak perlu dipertahankan.²²

Kritikan pedas tentang ketidakmampuan sekolah menjadi wahana aktualisasi peserta didik untuk mengembangkan potensinya dan menjadi proses yang membebaskan dan memanusiakan, juga datang dan Ivan Illich. Bahkan menurutnya, seperti yang dikutip oleh Azyumardi Azra, bahwa sekolah tidak mampu membawa perubahan apa-apa, bahkan hanya memperkuat struktur kelas sosial yang sudah mapan, karena itu sekolah sebaiknya dihapus saja dan diganti dengan jaringan belajar (*learning webs*).²³

Melihat potret di atas, manusia menjadi asing dengan kegiatannya (belajar) sendiri, karena pengetahuan telah menjadi monopoli dan produk yang hanya dimiliki guru serta menjadikan peserta didik sebagai konsumennya. Senada dengan hal ini menurut Paulo Freire, bahwa dalam konteks ini, sekolah (apa pun jenjangnya) menjadi sebuah pasar pengetahuan (*knowledge market*); para profesor atau guru menjadi seorang ahli yang menjual dan mendistribusikan pengetahuan yang telah dipaket (*packaged knowledge*), sedangkan peserta didik menjadi klien dan konsumen setia yang membeli dan mengkonsumsinya.²⁴ Dalam konteks ini telah terjadi komoditisasi pengetahuan, sehingga pengetahuan sudah menjadi barang mahal. Parahnya lagi proses ini hanya ada (terbatas) pada lembaga-lembaga tertentu. Jika hal ini terus bertahan, maka kapan pendidikan mampu menjadi milik masyarakat dan menjadi proses yang membebaskan dan memanusiakan.

4. Peserta Didik adalah Manusia

Dalam dunia pendidikan, salah satu titik tekan yang harus diperhatikan dengan penuh kesungguhan yang ikhlas adalah perlakuan terhadap peserta didik sebagai manusia. Oleh karena itu, pendidikan harus mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan dan diselenggarakan secara manusiawi. Pendidikan juga harus mampu mengenali, mengungkap dan mengembangkan segala potensi yang tersembunyi-dimiliki peserta didik. Jadi, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai ‘mengajar’ atau sekedar transfer of knowledge, hanya sekedar memindahkan ilmu pengetahuan yang saat itu dimiliki pendidik kepada peserta didik. Pandangan seperti ini tentunya sangat disayangkan, karena begitu sederhananya pemahaman mereka tentang pendidikan. Padahal yang dikembangkan oleh proses pendidikan bukan hanya aspek intelektualitas semata, namun yang lebih penting adalah pengembangan kepribadian (*personality*), pengembangan jiwa, pengembangan karakter dan cara pandang peserta terhadap kehidupan di masa depannya. Menurut

Kenneth D. Moore, bahwa mengajar merupakan sebuah tindakan dari seseorang yang mencoba untuk membantu orang lain mencapai kemajuan dalam berbagai aspek seoptimal mungkinsesuai dengan potensinya.²⁵

Pendidikan harus melihat manusia dengan segala perbedaan yang dimilikinya. Karena peserta didik bukanlah hasil kloning yang semuanya sama (homogen). Peserta didik datang dari berbagai latar belakang (background) kehidupan yang berbeda bahkan tidak menutup kemungkinan tujuan mereka untuk memperoleh pendidikan juga berbeda. Heterogenitas background dan personality peserta didik hendaknya disikapi secara arif dan bijaksana, karena hal itu merupakan keniscayaan yang tidak bisa diseragamkan. Lagi pula keseragaman (uniformity) bukanlah satu-satunya jalan untuk mendapatkan hasil maksimal. Karena keseragaman (uniformity) sangat berpotensi menghilangkan perbedaan yang telah menjadi sunnatullah.

Pandangan bahwa peserta didik adalah “manusia” merupakan tonggak awal perlakuan manusiawi terhadap peserta didik dalam lingkungan pendidikan. Banyak kalangan pendidik, khususnya yang menganggap bahwa peserta didik adalah mahluk yang harus selalu patuh dengan “titah” pendidiknya, selayaknya ia tidak mengerti apa-apa. Setiap hari dia harus datang, duduk, dengarkan, catat dan menuruti apa yang disampaikan oleh gurunya. Ia seperti “robot” yang “remot kontrol”nya dipegang oleh sang guru.

Kebebasan peserta didik telah dipasung oleh sebuah sistem yang kaku, di mana aspek fleksibilitas terabaikan. Sebenarnya sistem ini telah mematikan bukan hanya kreatifitas siswa semata melainkan kreatifitas guru ikut dimatikan. Guru tidak memiliki akses intelektual sama sekali dengan sistem ini. Sedangkan kondisi siswa jauh lebih “menderita” karena daya kreatifitasnya telah dimatikan. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pendidikan guru yang hanya mengejar “target” yang telah dipaketkan oleh para penguasa. Guru tidak melihat sejauhmana daya serap peserta didik terhadap materi yang diajarkan, karena yang terpenting baginya adalah target kurikulum dapat tercapai.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa peran seorang guru dalam mendidik sangat memengaruhi peserta didik. Warna peserta didik adalah bagian goresan sang pendidik. Peran vital dan strategis ini seharusnya bisa dimainkan oleh guru dengan sebaik mungkin dalam proses pembelajaran. Guru dituntut untuk mampu memfasilitasi perkembangan peserta didik sesuai dengan potensi-potensi yang ada. Karena pendidikan adalah media dan aktifitas membangun dan mengembangkan potensi peserta didik.

Demikianlah, pendidikan seharusnya memberi kemerdekaan untuk menginterpretasikan keinginan, ambisi, dan semangat tanpa dibatasi pakem, bahkan 'norma'. Pendidikan yang memerdekakan seharusnya memberi ruang untuk siswa berani menentukan keputusan sendiri, berkreasi, dan mengambil risiko. Pendidikan yang memerdekakan akan bermuara pada kebangkitan!

Soekarno, Habibie, Gus Dur, Hatta, bukanlah produk dari pendidikan yang kerdil. Mereka beruntung dapat berguru dari sumber ilmu yang memberi ruang bagi ide-ide 'gila' dan 'nyeleneh'. Nasionalisme, industri strategis, pluralisme dan ekonomi kerakyatan adalah buah pendidikan yang memerdekakan siswa didik. Semakin terbukanya dunia, maka siswa semakin dituntut memiliki mental eksploratif, kreatif dan kritis.

5. Memerdekakan Sang Guru

Seperti yang dikemukakan di atas, bahwa sistem yang kaku (rigid sistem) dapat mematikan daya kreatifitas guru. Rigid sistem seperti yang dimainkan oleh sistem sentralisasi yang selalu mengacu pada “program paketan” yang telah ditentukan pemerintah tanpa adanya pemberian alternatif, secara langsung telah menghilangkan otonomi guru sebagai pendidik. Ia kehilangan akses intelektualnya terhadap mata pelajaran yang akan disampaikan. Kebebasannya untuk berkreasi dan bereksperimen telah dipasung, hal ini akan sangat merugikan pengembangan mutu pendidikan itu sendiri, karena praktek seperti ini telah menghilangkan persaingan mutu yang memicu “dinamisasi pembelajaran”. Sehingga lagi-lagi peserta didik yang jadi korban. Guru hanya menerima “paketan” mata pelajaran dari pusat, tanpa diberikannya keleluasaan dan kekuatan untuk mengembangkannya sendiri dan menyesuaikannya dengan realitas disekelilingnya. Kondisi di atas telah mengubur “budaya alternatif” dan proses pembelajaran.

Sistem “paketan” tersebut telah dibuat di pusat kota “Jakarta” sedangkan pelaksanaannya dilakukan berbagai pelosok tanah air. Ironisnya sang pembuat tersebut belum bahkan tidak tahu realitas kondisi daerah, tempat paketan tersebut dilaksanakan. Sehingga aspek relevansi dengan yang bersangkutan menjadi tidak tersentuh. Maka tidak heran jika out put dan kebutuhan masyarakat tidak sesuai, akibatnya lulusan pendidikan tidak dipakai oleh masyarakat, bahkan hanya menimbulkan pengangguran baru. Karena itu sekolah bukan lagi sebagai produsen Sumber Daya Manusia (SDM) handal, melainkan “produsen pengangguran”. Untuk itu akses guru dalam mengembangkan mata pelajaran sangat dibutuhkan, karena dengan begitu ia akan lebih dituntut untuk dapat menyajikan materi yang dibawanya menjadi kemasan yang menarik dengan tambahan berbagai informasi yang ada.

Pemberian kebebasan pada guru untuk mengembangkan materi pelajaran yang dibawanya bukan hanya merupakan keniscayaan tapi juga harus muncul dari political will pemerintah. Guru akan mengkaji dan menganalisa materi pelajaran sesuai dengan kualifikasinya pada mata pelajaran tersebut. Dengan begitu guru akan lebih terpacu untuk memberikan yang terbaik pada peserta didiknya. Ia tidak merasa tertekan dalam menyampaikan materi yang diajarkannya.

Pemberian kebebasan pada guru untuk mengembangkan materi yang diajarkannya akan berimplikasi positif pada proses pembelajaran dalam kelas, khususnya pada peserta didik karena ia juga akan ikut dimerdekakan. Peserta didik akan diberikan keleluasaan untuk berkembang sesuai jati dirinya, sehingga ia akan mampu belajar secara mandiri "*independent learning*". Ia akan aktif mencari dan mengolah informasi dan menjadikannya pengetahuan yang bermakna "*valuable knowledge*" sedangkan guru menjadi fasilitator kreatif. Dengan demikian, akan tercipta pembelajaran yang aktif baik di dalam maupun di luar kelas. Belajar aktif merupakan strategi belajar yang diartikan sebagai proses pembelajaran yang menggunakan berbagai metode yang menitikberatkan kepada keaktifan siswa dan melibatkan berbagai potensi siswa, baik yang bersifat fisik, mental, emosional maupun intelektual untuk mencapai tujuan pendidikan yang berhubungan dengan wawasan kognitif, afektif dan psikomotorik secara optimal.²⁶ Dengan proses pembelajaran seperti itu, maka diharapkan akan melahirkan out-put yang mampu bersaing dengan out-put dari negara lain dalam menghadapi era globalisasi.

SIMPULAN

Untuk itu diperlukan sekolah-sekolah yang mampu melakukan pembelajaran yang menyenangkan, menanamkan karakter yang kuat sebagai warga bangsa, memberikan ruang yang cukup untuk para guru dan peserta didik mengeksplorasi berbagai potensi yang dimilikinya dan peka terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Sekolah tidaklah semata – mata menjadi tempat di mana guru menyampaikan pengetahuan melalui berbagai mata pelajaran, sekolah merupakan lembaga yang mengusahakan usaha dan proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai.²⁷ Perubahan-perubahan sosial yang sangat cepat tentunya menuntut pandangan-pandangan baru dalam pendidikan. Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari perubahan sosial dan lembaga pendidikan itu sendiri merupakan bagian yang terintegrasi dengan perubahan sosial.²⁸

Pendidikan pada akhirnya harus dapat menjadikan seorang individu untuk berfungsi selayaknya manusia, makhluk sosial yang bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakatnya. Wujudnya adalah pendidikan yang memerdekakan cara berpikir, membangun akal budi dengan memupuk hati nurani, menanyakan apa yang benar dan mendekatkan diri dengan Tuhan, sumber segala kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdurrahman Saleh., *Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, cet. ke-2
Ahmadi, Abu., *Sosiologi Pendidikan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982, cet. ke-4

- Ali, H.B. Hamdani., *Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: Kota Kembang, 1993, cet. ke-3
- Amstrong, Thomas., (Rina Buntaran-Terjemah), *Panduan Membantu Anak Belajar dengan Memafaatkin Multiple Intellegence-nya*, Jakarta: Gramedia, 2002
- Arifin, M., *Filsafat Pendidikan*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, cet. ke-1
- Atmadi, A., dan Y. Setyaningsih (ed.), *Transformasi Pendidikan Memasuki Millenium Ketiga*, Yogyakarta: Kanisius, 2000
- Azra, Azyumardi., *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000, cet. ke-2
- _____, Azyumardi., *Paradigma Baru Pendidikan Nasional; Rekonstruksi dan Demokratisasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002
- Cahyo, Agus N., *Panduan Aplikasi Teori–Teori Belajar Mengajar Teraktual dan Terpopuler*, Jogjakarta: DIVA Press 2013
- Freire, Paulo, (Agung Prihantoro-terjemah), *Pendidikan Sebagai Proses*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, cet. ke-1
- _____, *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, cet. ke-2
- Mahendra, Yusril Ihza, *Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Muhammad, Rusjdi Ali., *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Syariat Islam; Mengenal Jati Diri Manusia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004
- Muzaffar, Chandra., *HAM dalam Tatanan Dunia Baru; Menggugat Dominasi Global Barat*, Jakarta: Mizan, 1995, cet. ke-1
- Nata, Abuddin., *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 1998
- Phenix, Philip H., *Realms of Meaning*, New York : McGraw-Hill Book Company, 1964
- Redaksi Saptadarma, *Risalah Ahli Didik Prof. Dr. John Dewey (II)*, Jakarta: Saptadarma, 1955
- Rosyada, Dede., *Paradigma Pendidikan Demokratis; Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- S, H. D. Sudjana., *Pendidikan Luar Sekolah: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung dan Azas*, Bandung: Falah Production, 2001, cet. ke-3
- Syam, Muhammad Noor., *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, Surabaya: Usaha Nasional, 1988, cet. ke-4
- Tilaar, H.A.R., *Kekuasaan dan Pendidikan; Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, Magelang: Indonesa Tera, 2003
- _____, *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000, cet. ke-2
- _____, *Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2002
- United Nations, *Human Rights: Questions and Answers*, New York: United Nations, 1987
- Wen, Sayling., *Future of Education*, Batam: Lucky Publishers, 2002

Catatan Kaki

1. United Nations, *Human Rights: Questions and Answers*, (New York: United Nations, 1987), h. 4
2. H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000), cet. ke-2, h. 155
3. Yusril Ihza Mahendra, *Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 90
4. H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan*, h.129- 130
5. M. Arifin, *Filsafat Pendidikan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), cet. ke-1, h. 58
6. Philip H. Phenix, *Realms of Meaning*; (New York : McGraw-Hill Book Company, 1964), h. 17
7. Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Syariat Islam; Mengenal Jati Diri Manusia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), 36
8. Sayling Wen, *Future of Education*, (Batam: Lucky Publishers, 2002), h. 105
9. Paulo Freire, *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), cet. ke-2, h. 176
10. H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 432
11. A. Atmadi dan Y. Setiyaningsih (ed.), *Transformasi Pendidikan Memasuki Millenium Ketiga*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 22
12. Chandra Muzaffar, *HAM dalam Tatanan Dunia Baru; Menggugat Dominasi Global Barat*, (Jakarta: Mizan, 1995), cet. ke-1, h. 32
13. Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 38
14. H.B. Hamdani Ali, *Filsafat Fendidikan*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1993), cet. ke-3, h. 173
15. Redaksi Saptadarma, *Risalah Ahli Didik Prof. Dr. John Dewey (II)*, Jakarta: Saptadarma, 1955), h. 23
16. H. A. R. Tilaar, *Perubahan Sosial.....*,h. 435-436
17. Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), cet. ke-4, h. 86
18. Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), cet. ke-2, h. 89-90
19. Muhammad Noor Syam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1988), cet. ke-4, h. 177
20. Chandra Muzaffar, *HAM Dalam Tatanan Dunia Baru;*, h. 32
21. Thomas Armstrong, (Rina Buntaran-Terjemah), *Panduan Membantu Anak Belajar dengan Memafaatkan Multiple Intellegence-nya*, (Jakarta: Gramedia, 2002), h. 57
22. H. D. Sudjana S, *Pendidikan Luar Sekolah: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung dan Azas*, (Bandung: Falah Production, 2001), cet.ke-3, h. 86-87
23. Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), cet. ke-2, h. 4
24. Paulo Freire, (Agung Prihantoro-terjemah), *Pendidikan Sebagai Proses*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), cet. ke-1, h. 13
25. Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis; Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 91
26. Agus N. Cahyo, *Panduan Aplikasi Teori – Teori Belajar Mengajar Teraktual dan Terpopuler*, Jogjakarta: DIVA Press 2013), h. 137
27. Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional ; Rekonstruksi dan Demokratisasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002) h. 175
28. H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan; Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, (Magelang: Indonesa Tera, 2003), h. 147